



KEMENTERIAN KEUANGAN RI

KEBIJAKAN FISKAL NASIONAL DAN HUBUNGAN KEUANGAN ANTARA PUSAT DAN DAERAH TAHUN 2012



Surabaya, 16 April 2012



Outline

1

KEBIJAKAN FISKAL 2012

2

HUBUNGAN KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH SAAT INI

3

PENGELOLAAN KEUANGAN PEMDA PROV JAWA TIMUR

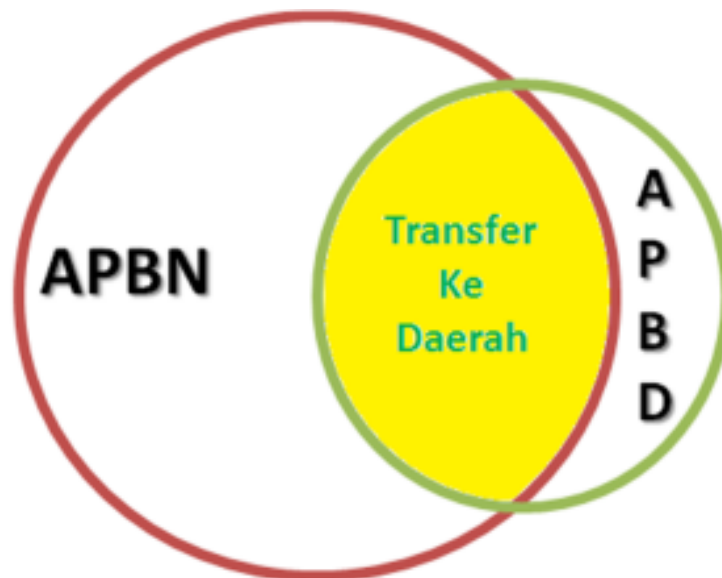
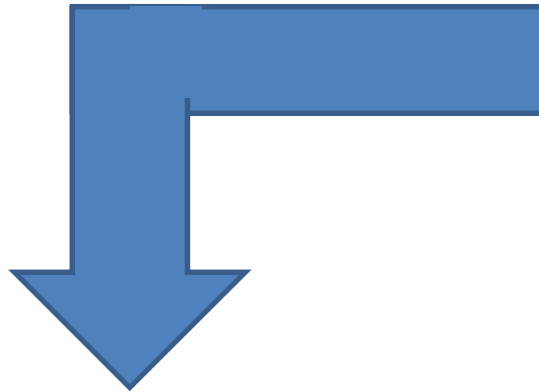


Kebijakan Fiskal Nasional

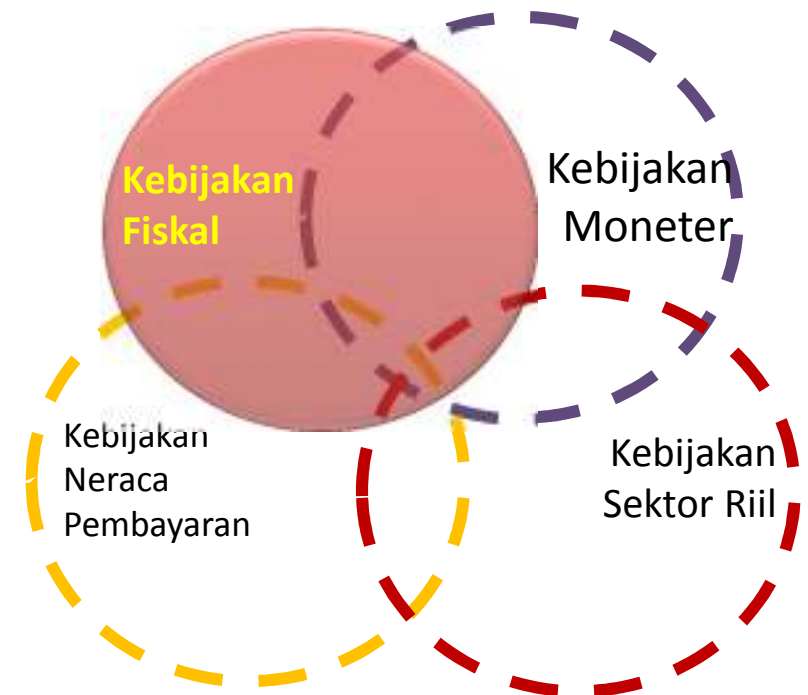


Hubungan Kebijakan Fiskal Nasional dan Daerah

- Kebijakan fiskal daerah harus sejalan dan mendukung dengan keempat kebijakan makro nasional.
- Seluruh kebijakan makro, terutama Kebijakan Fiskal mempengaruhi Kebijakan Transfer ke Daerah

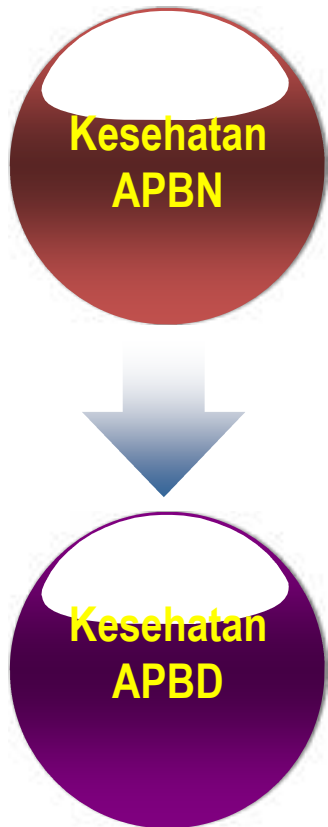


Interrelasi Kebijakan Makro





Kebijakan Fiskal Nasional yang Sustainable



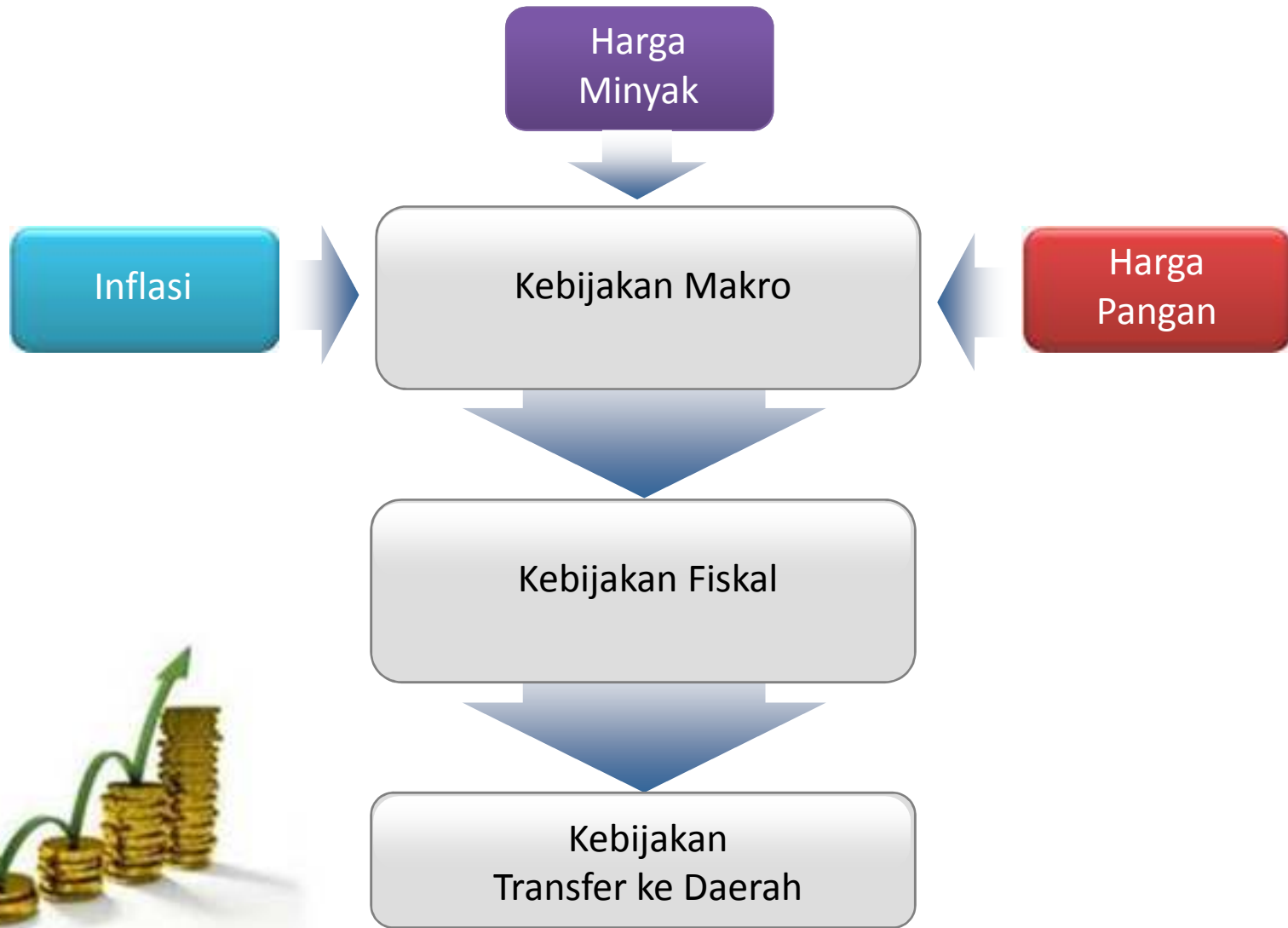
dalam triliun rupiah

Uraian	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
	LKPP	LKPP	LKPP	LKPP	APBNP	APBNP	APBNP
Pendapatan	638	707,8	981,6	848,8	992,4	1.292,9	1.358,2
Belanja	667,1	757,6	985,7	937,4	1.126,1	1.418,5	1.548,3
Surplus/Defisit	(29,1)	(49,8)	(4,1)	(88,6)	(133,7)	(125,6)	(190,1)
% thd PDB	(0,9)	(1,3)	(0,1)	(1,6)	(2,1)	(1,5)	(2,23)
Pembiayaan	29,4	42,5	84,1	112,6	133,7	125,6	190,1

Kebijakan fiskal yang *sustainable* apabila dalam jangka panjang, defisit terkendali



Tantangan Kebijakan Fiskal Nasional TA 2012 dan Ke Depan





Perkembangan Indikator Ekonomi Makro 2011

	Target	Capaian
Pertumbuhan Ekonomi	6,2%	6,5%
Inflasi	5,65%	3,79%
Nilai Tukar	Rp8.700/USD	Rp8.779/USD*
Suku Bunga SPN 3 Bulan	5,6%	4,84%*
ICP	95 USD	111,55 USD*
Lifting Minyak	945 ribu barrel/hr	898,5 ribu barrel/hr

* Nilai rata-rata sepanjang tahun 2011



Asumsi Makro Ekonomi APBN-P 2012

Indikator	2011 APBN-P	2012 APBN	2012 APBN-P
Pertumbuhan Ekonomi (%)	6,5	6,7	6,5
Inflasi (yoy,%)	5,65	5,3	6,8
Nilai Tukar Rupiah (Rp/USD)	8.700	8.800	9.000
Suku Bunga SPN 3 Bulan (%)	5,6	6,0	5,0
Harga Minyak Mentah Indonesia (ICP) (USD/barrel)	95	90	105
Lifting Minyak Indonesia (Ribu Barrel per hari)	945	950	930



Kebijakan Umum APBN-P 2012

- 1 Menjaga sustainabilitas fiskal dan meningkatkan daya tahan fiskal ditengah ketidakpastian ekonomi global.
- 2 Memperbaiki efisiensi ekonomi
- 3 Meningkatkan investasi untuk menstimulasi ekonomi
- 4 Menjaga daya beli masyarakat
- 5 Meningkatkan kesejahteraan masyarakat



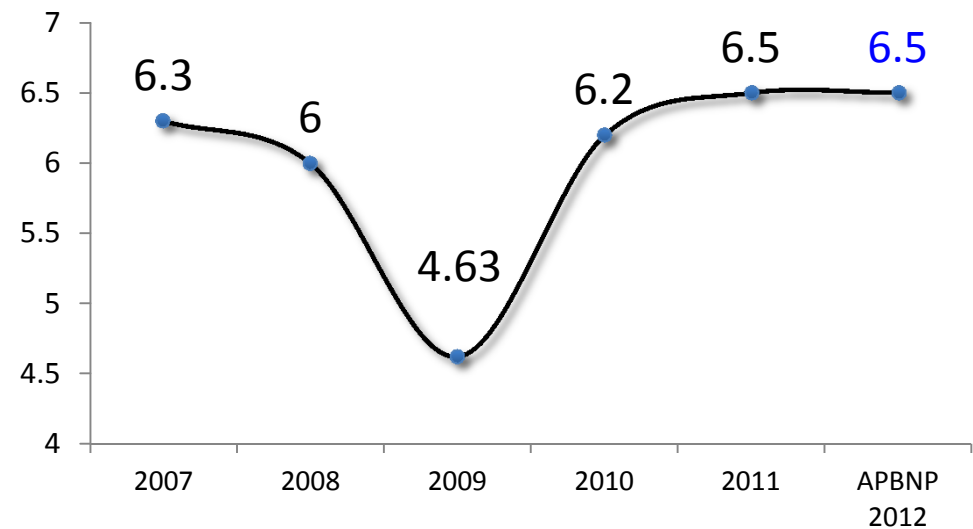
Pertumbuhan Ekonomi 2012

	Pertumbuhan		Kontribusi Pertumbuhan	
	2011	2012	2011	2012
PDB	6.5	6.5	6.5	6.5
Pengeluaran				
Konsumsi RT	4.7	4.9	2.7	2.7
Konsumsi Pemerintah	3.2	6.8	0.3	0.6
Investasi	8.8	10.9	2.1	2.7
Ekspor	13.6	9.9	6.3	4.9
Impor	(13.3)	(11.4)	(4.8)	(4.4)
Net Ekspor	14.4	4.9	1.5	0.5

Sektoral

Pertanian	3	3.5	0.4	0.4
Pertambangan	1.4	2.0	0.1	0.2
Industri	6.2	6.1	1.6	1.6
Listrik, Gas, dan Air	4.8	6.2	0	0
Konstruksi	6.7	7.0	0.4	0.5
Perdagangan	9.2	8.9	1.6	1.6
Transp & Kom	10.7	11.2	1	1.1
Keuangan	6.8	6.3	0.7	0.6
Jasa-jasa	6.7	6.2	0.6	0.6

Pertumbuhan Ekonomi

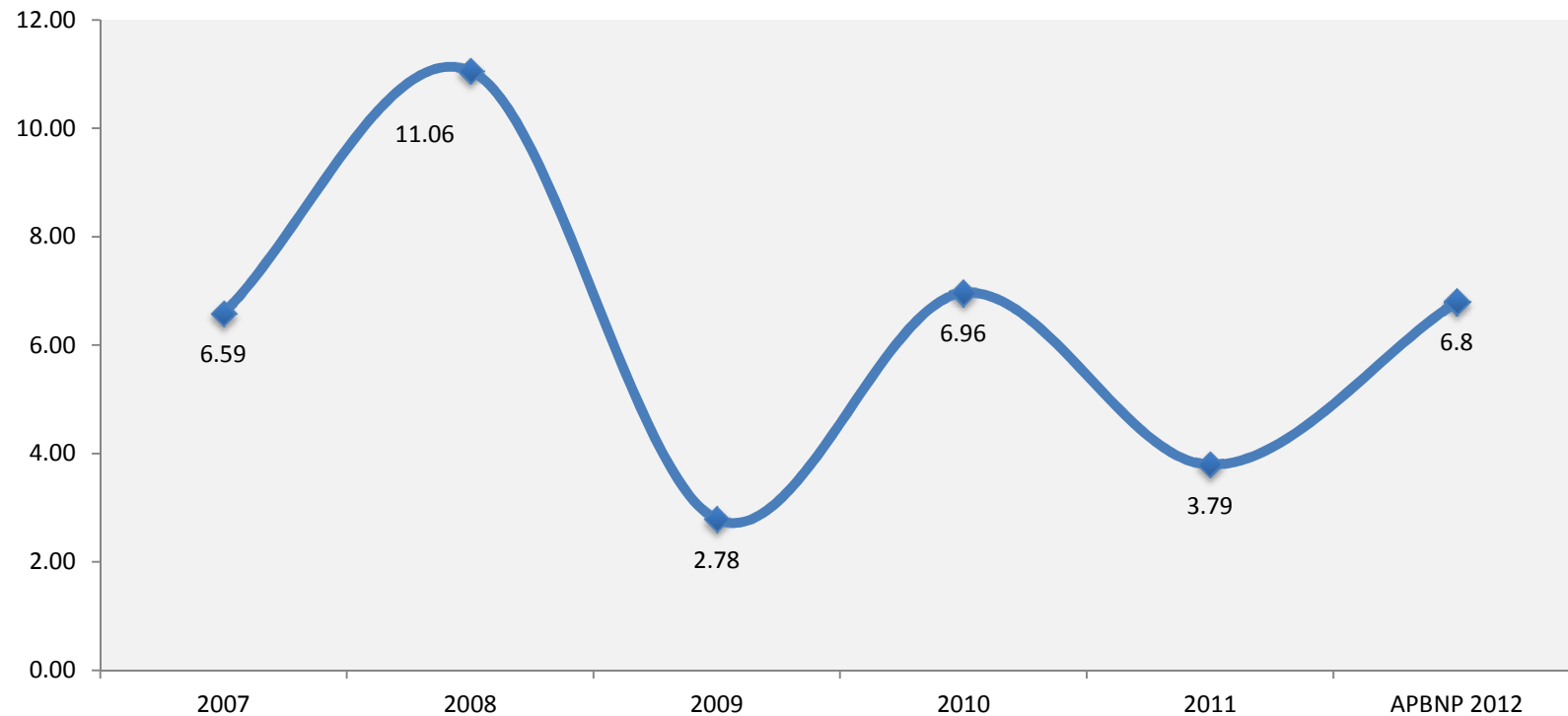


2012:

- Kontribusi ekspor netto menurun akibat perlambatan ekspor
- Kontribusi investasi meningkat:
 - ✓ Perbaikan iklim investasi
 - ✓ Program MP3EI
- Sektor industri pengolahan, perdagangan dan transportasi masih menjadi kontributor pertumbuhan terbesar



Inflasi 2012

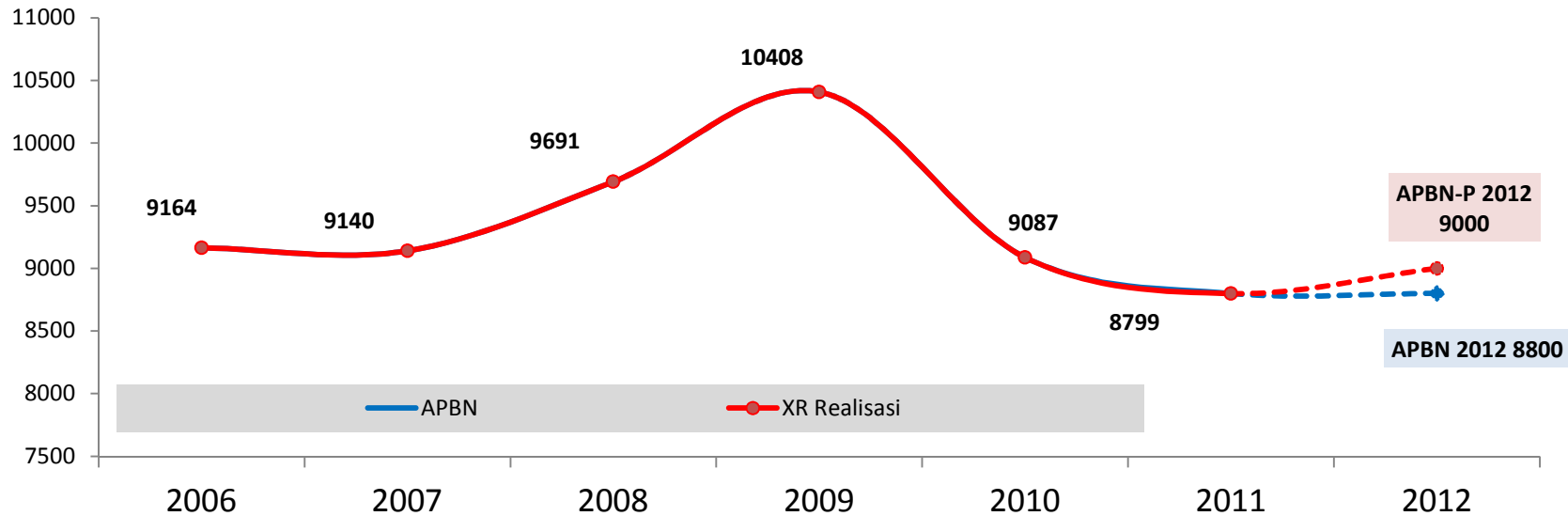


- Rencana kebijakan penyesuaian harga BBM domestik diduga akan mendorong inflasi sebesar 6,8%.
- Kebijakan pengurangan subsidi energi akan disertai dengan kebijakan pengendalian (mis. Stabilisasi harga pangan).



Nilai Tukar 2012

Perkembangan Nilai Tukar



Sentimen Positif:

- Peningkatan *credit rating* Indonesia menjadi investment grade
- Arus modal masuk masih terjadi walau tidak sekuat di tahun 2011

Sentimen Negatif:

- Kekhawatiran terhadap pemulihan ekonomi global karena ketidakjelasan penanganan krisis ekonomi di negara-negara EU dan ketegangan geopolitik Timur Tengah yang mendorong kenaikan harga komoditas
- Menipisnya surplus neraca transaksi berjalan Indonesia karena peningkatan laju impor; serta
- Potensi tekanan inflasi sebagai dampak kebijakan pemerintah di bidang harga.



HUBUNGAN KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH (KEBIJAKAN UMUM DAN ISSUE SAAT INI)



Kebijakan Umum HKPD

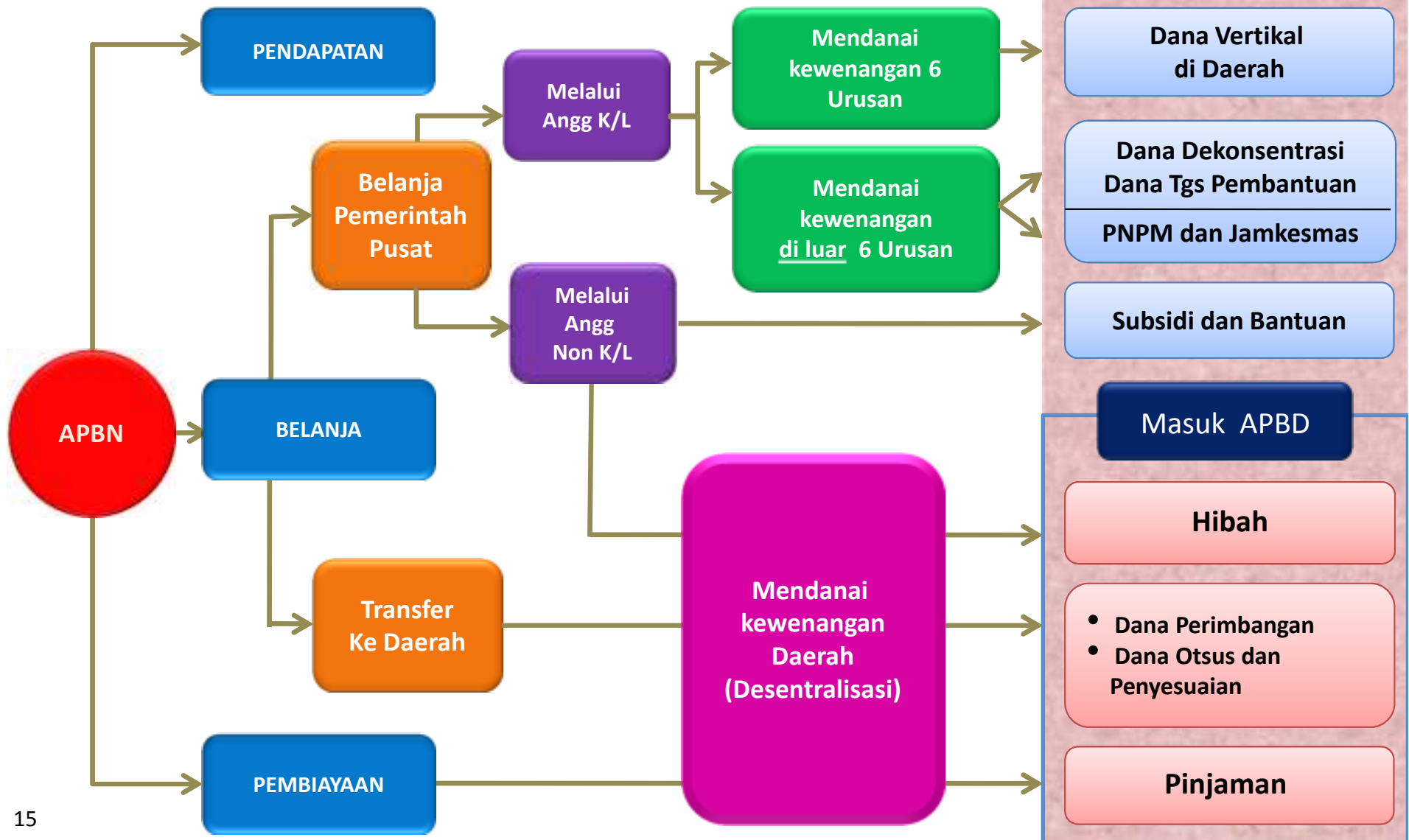
- Perimbangan keuangan dilakukan melalui transfer/hibah dari Pusat kepada Daerah dan didukung dengan penyerahan sebagian kewenangan perpajakan kepada daerah.
- Mengingat bahwa kewenangan perpajakan di daerah masih sangat terbatas, maka dukungan pendanaan daerah melalui transfer masih lebih mendominasi (untuk saat ini).
- Sesuai esensi otonomi daerah, maka sebagian besar dukungan dana dari APBN berbentuk **block grants** (bebas digunakan oleh daerah)
- *Block grants* juga didukung dengan **specific grants**, yg berfungsi untuk mengawal prioritas nasional dan kesetaraan kualitas layanan publik antar daerah.
- Selaras dengan peningkatan kebutuhan pendanaan daerah, Pemerintah Pusat terus mendorong upaya kemandirian pendanaan melalui penguatan **local taxing power** dan transfer diupayakan **terus meningkat** dari tahun ke tahun.
- Untuk mendorong ekspansi pembangunan daerah guna mendorong perekonomian, daerah dapat melakukan pinjaman.

Alur Belanja APBN ke Daerah

Pemerintah Pusat

Daerah

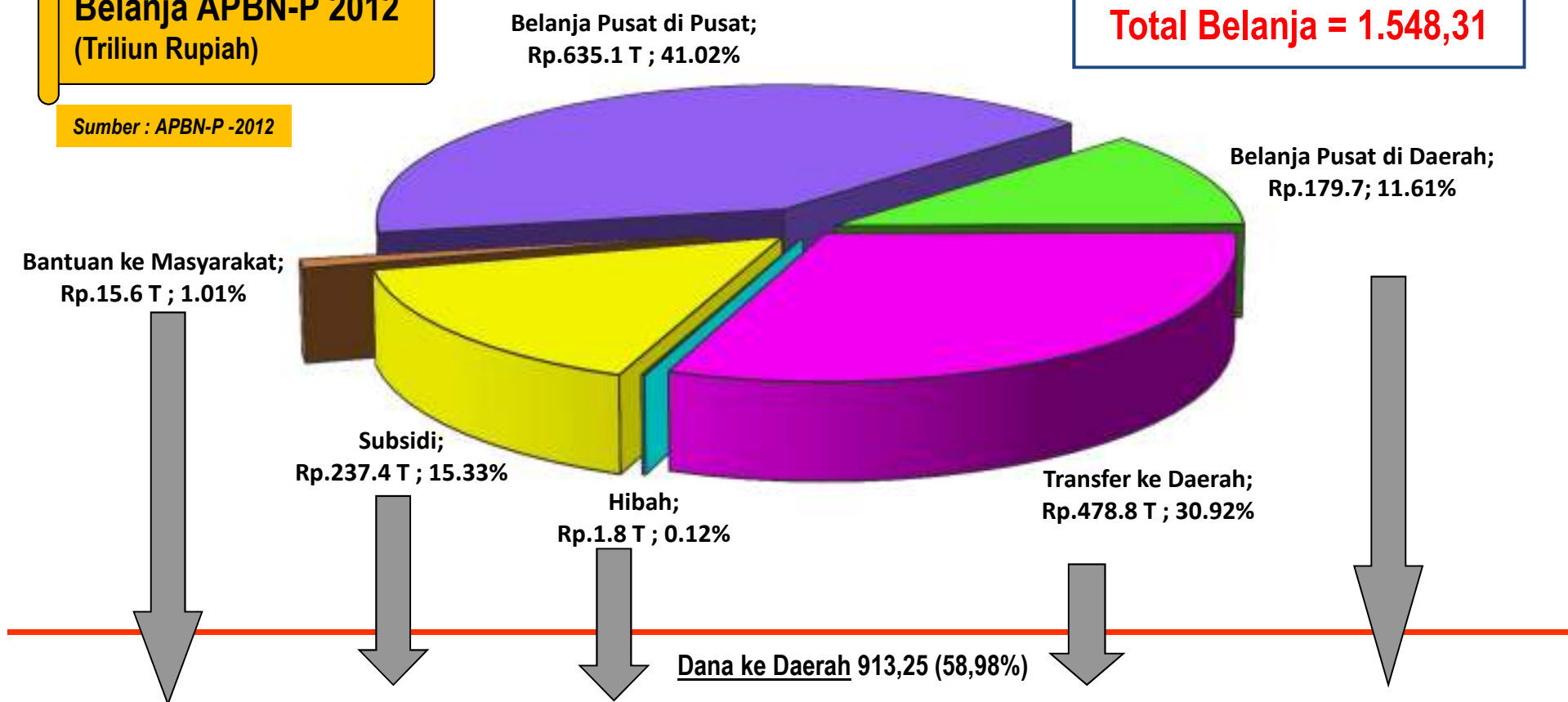
MONEY FOLLOWS FUNCTION AND CAPACITY



Belanja APBN-P 2012 (Triliun Rupiah)

Sumber : APBN-P -2012

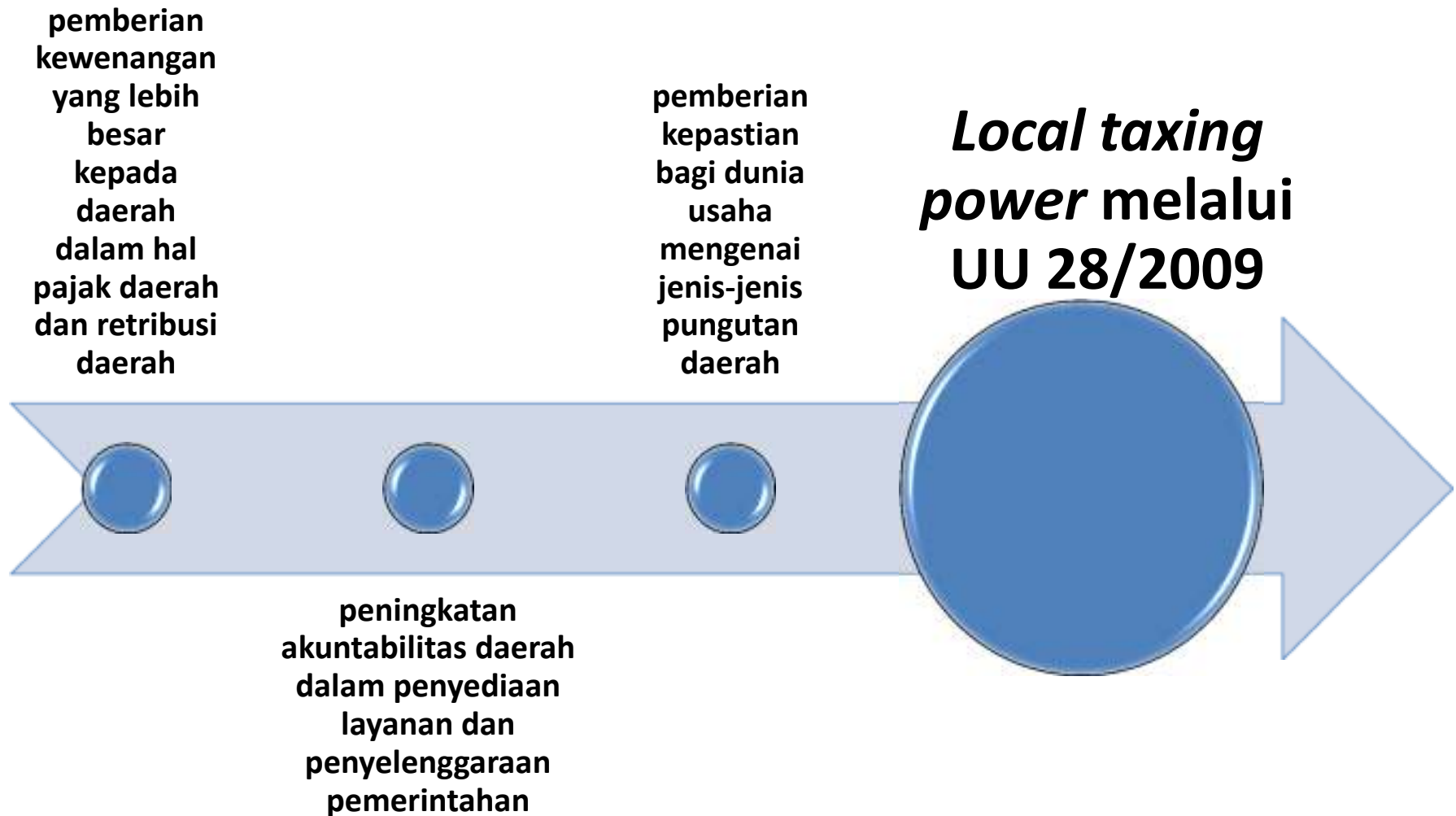
Total Belanja = 1.548,31



Melalui Angg.K/L dan APP (Program Nasional)		Melalui APP (Subsidi)		Hibah		Melalui Angg. Transfer ke Daerah (Masuk APBD)		Melalui Angg. K/L	
•PNPM	9.6(0.62%)	• BBM	137.4(8.87%)	• Hibah	1.8(0.12%)	•DBH	108.4(7.00%)	• Dana Dekon	21.9(1.42%)
•Jamkes	5.9(0.38%)	• Listrik	65(4.19%)			•DAU	273.8(17.68%)	• Dana TP	14.2(0.92%)
		• Pangan	20.9(1.35%)			•DAK	26.1(1.68%)	• Dana Vertikal	143.6(9.28%)
		• Pupuk	14(0.90%)			•OTSUS	12(0.77%)		
		• Benih	0.1(0.00%)			• Penyesuaian	58.5(3.77%)		
*) APP = Anggaran Pembiayaan dan Perhitungan									
Total	15.6(1.01%)	Total	237.4(15.33%)	Total	1.8(0.12%)	Total	478.8(30.92%)	Total	179.7(11.61%)



Kebijakan Pajak dan Retribusi Daerah





Kebijakan Pajak dan Retribusi Daerah

No.	Tujuan	Strategi	Kebijakan
1.	MEMPERBAIKI KEWENANGAN PEMUNGUTAN	MENETAPKAN JENIS PUNGUTAN DAERAH	CLOSED LIST Daerah hanya memungut jenis pajak dan retribusi yang tercantum dalam UU No. 28 Tahun 2009
2.	PENGUATAN LOCAL TAXING POWER	MEMPERLUAS BASIS PUNGUTAN DAN DISKRESI PENETAPAN TARIF	<ol style="list-style-type: none"> 1. MEMPERLUAS OBJEK (Pajak Hotel, Pajak Restoran) 2. MENAMBAH JENIS (Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Rokok, BPHTB, PBB-Perkotaan dan Perdesaan) 3. MENAIKKAN TARIF MAKSIMUM (Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak parkir, Pajak Hiburan) 4. DISKRESI PENETAPAN TARIF (Daerah bebas menetapkan tarif dalam batas tarif minimum dan maksimum yang ditetapkan dalam UU)
3.	MENINGKATKAN EFEKTIVITAS PENGAWASAN	MENGUBAH SISTEM PENGAWASAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. PENGAWASAN PREVENTIF DAN KOREKTIF <ol style="list-style-type: none"> a. Raperda terlebih dahulu dievaluasi b. Perda disesuaikan dengan hasil evaluasi c. Perda yang telah ditetapkan disampaikan ke Pemerintah d. Perda yang bertentangan dengan UU dibatalkan 2. SANKSI <ol style="list-style-type: none"> a. Administratif (Prosedur): Penundaan DAU dan/atau DBH PPh b. Substansif : Pemotongan DAU dan/atau DBH PPh
4.	MEMPERBAIKI SISTEM PENGELOLAAN	MENINGKATKAN KUALITAS PENGGUNAAN HASIL PAJAK DAERAH	<ol style="list-style-type: none"> 1. MEMPERBAIKI BAGI HASIL PAJAK PROVINSI KE KAB/KOTA <ol style="list-style-type: none"> a. PKB dan BBNKB: 30% b. Pajak Rokok : 70% c. PBBKB : 70% d. Pajak Air Permukaan : 50% 2. MEMPERTEGAS EARMARKING <ol style="list-style-type: none"> a. 10% PKB untuk perbaikan jalan b. 50% Pajak Rokok untuk pelayanan kesehatan c. Sebagian PPJ untuk penerangan 3. MEMPERBAIKI SISTEM INSENTIF PEMUNGUTAN Diberikan atas dasar pencapaian kinerja tertentu



KESIAPAN DAERAH MEMUNGUT BPHTB DI PROVINSI JATIM

Per 9 April 2012

No.	Kesiapan Daerah	Jumlah		Persentase (%)	
		Daerah	Penerimaan BPHTB (Rp)	Jumlah Daerah	Penerimaan BPHTB (Rp)
			2010		2010
1.	Perda yang telah siap	38	762,482,532,693	100	100
2.	Raperda (dalam proses)				
3.	Belum menyusun Raperda				
Total		38	762,482,532,693	100	100

Sumber: DJPK dan DJP



KESIAPAN DAERAH MEMUNGUT PBB-P2* Di PROVINSI JATIM

Per 9 April 2012

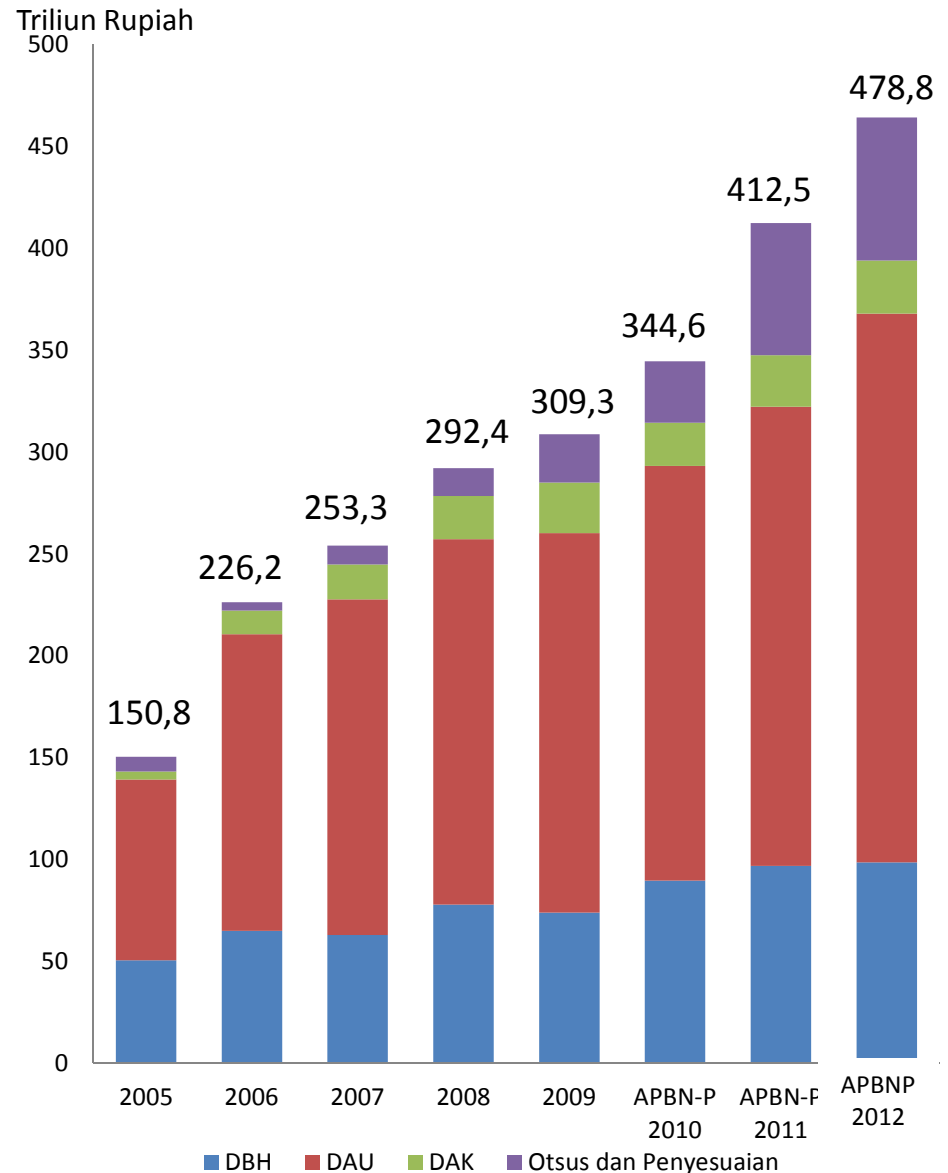
No.	Kesiapan Daerah	Jumlah		Persentase (%)	
		Daerah	Penerimaan PBB-P2 2010 (Rp)	Jumlah Daerah	Penerimaan PBB-P2 2010
1.	Perda yang telah siap	19	878,823,748,360	50.0	80.71
2.	Raperda (dalam proses)	5	41,303,981,086	13.16	3.79
3.	Belum menyusun Raperda	14	168,748,397,323	36.84	15.50
Total		38	1,088,876,126,769	100	100

Sumber: DJPK dan DJP



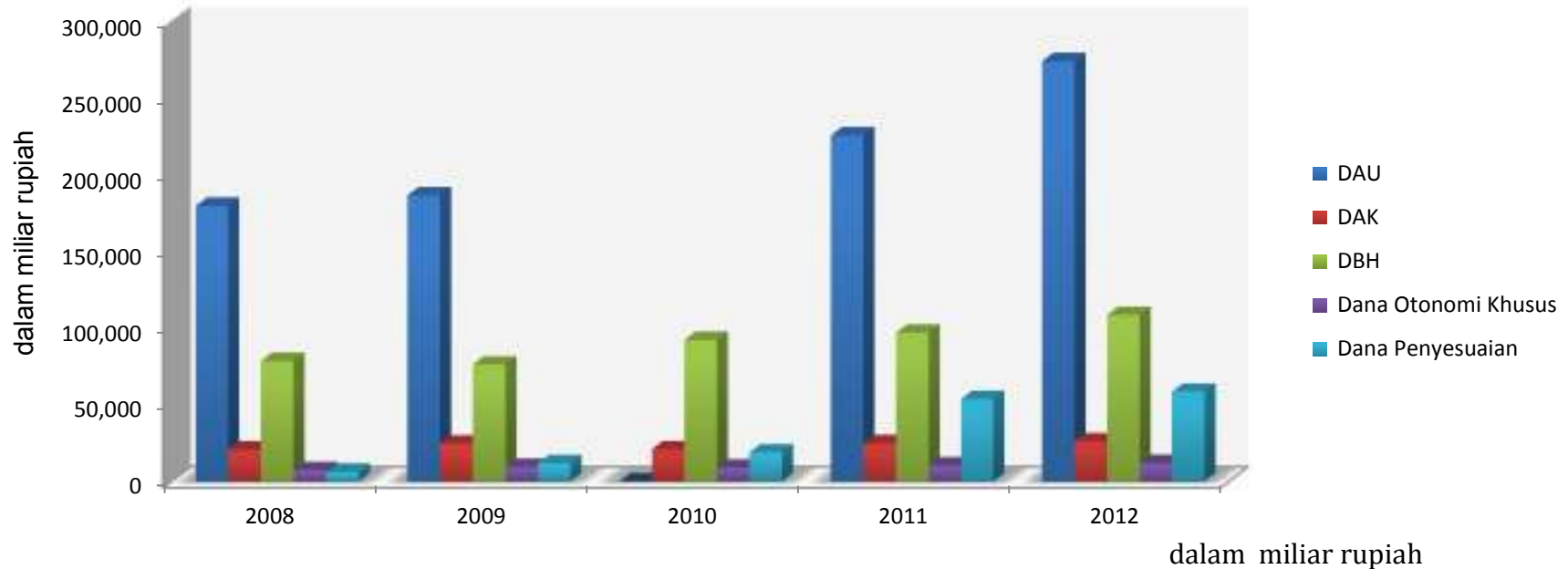
Kebijakan Umum Transfer ke Daerah

- Meningkatkan **kapasitas fiskal daerah** dan **mengurangi kesenjangan fiskal** antara pusat & daerah dan antar daerah.
- **Menyelaraskan kebutuhan** pendanaan di daerah sesuai dengan pembagian urusan pemerintahan.
- Meningkatkan **kualitas pelayanan publik** di daerah & mengurangi kesenjangan pelayanan publik antar daerah.
- Meningkatkan kemampuan daerah dalam mendorong **perekonomian** daerah.
- Mendukung **kesinambungan fiskal** nasional.
- Meningkatkan **efisiensi pemanfaatan sumber daya nasional**.
- Meningkatkan **sinkronisasi** antara rencana pembangunan nasional dengan rencana pembangunan daerah.





TREN TRANSFER KE DAERAH TAHUN 2008 - 2012

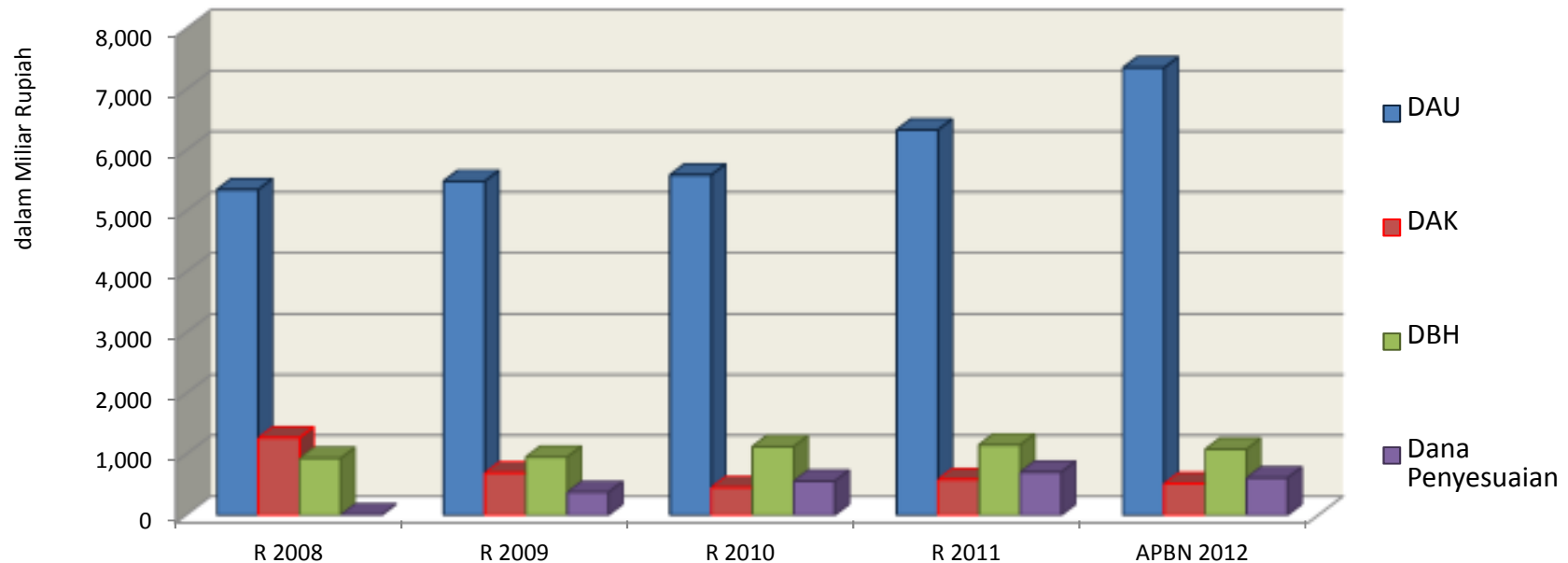


Komponen Transfer	2008	2009	2010	2011	2012
DAU	179.507,14	186.414,10	203.571,5	225.533,71	273.814,40
DAK	20.787,30	24.707,40	20.956,30	24.803,51	26.115,90
DBH	78.420,20	76.129,90	92.183,50	96.910,87	108.421,70
Dana Otonomi Khusus	7.510,29	9.526,60	9.099,61	10.421,31	11.952,60
Dana Penyesuaian	6.208,50	11.807,20	18.916,70	53.709,02	58.471,40
Total	292.433,43	308.585,20	344.727,42	411.378,42	478.775,90

Keterangan: Tahun 2008 – 2010 data diambil berdasarkan LKPP
 Tahun 2011 data realisasi unaudited
 Tahun 2012 data pagu APBNP



TREN TRANSFER KE DAERAH SE-PROVINSI JATIM TAHUN 2008 - 2012



dalam miliar rupiah

Komponen	2008	2009	2010	2011	2012
DAU	5.351,55	5.489,44	5.593,76	6.332,75	7.353,90
DAK	1.269,27	691,26	453,64	584,01	515,37
DBH	930,50	952,39	1.125,71	1.153,30	1.078,64
D. Penyesuaian	0	373,99	559,42	706,66	610,70
Total	7.551,32	7.507,08	7.732,53	8.776,72	9.558,60

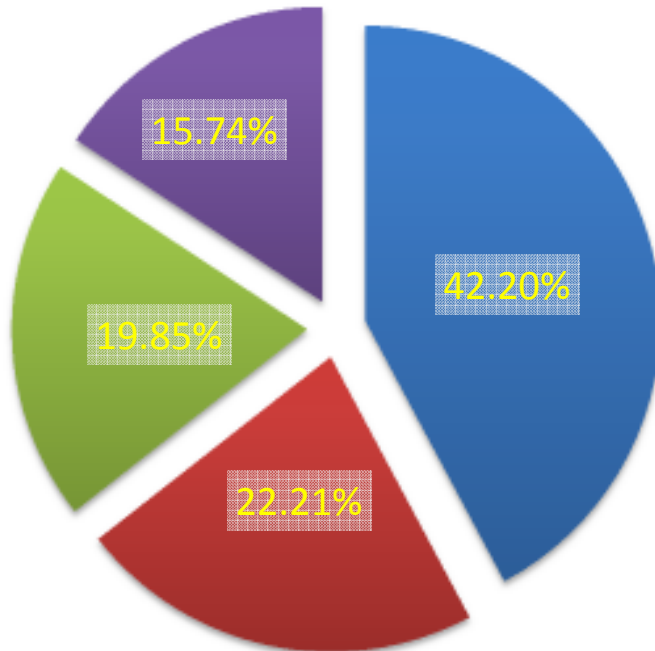


PENGELOAAN KEUANGAN PEMDA DI JAWA TIMUR



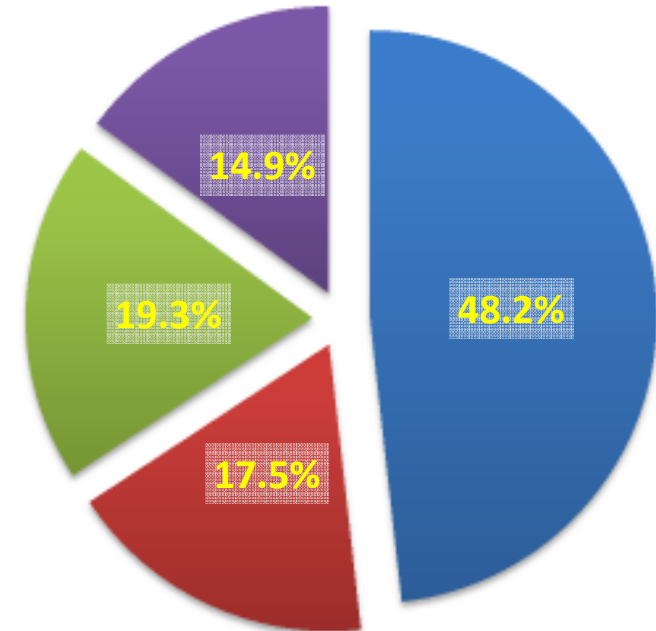
PORSI BELANJA APBD TA 2012

NASIONAL



■ Belanja Pegawai ■ Belanja Modal ■ Belanja Barang ■ Belanja Lainnya
• Data per 31 maret 2012 (510 Daerah).

SELURUH PEMDA DI JAWA TIMUR

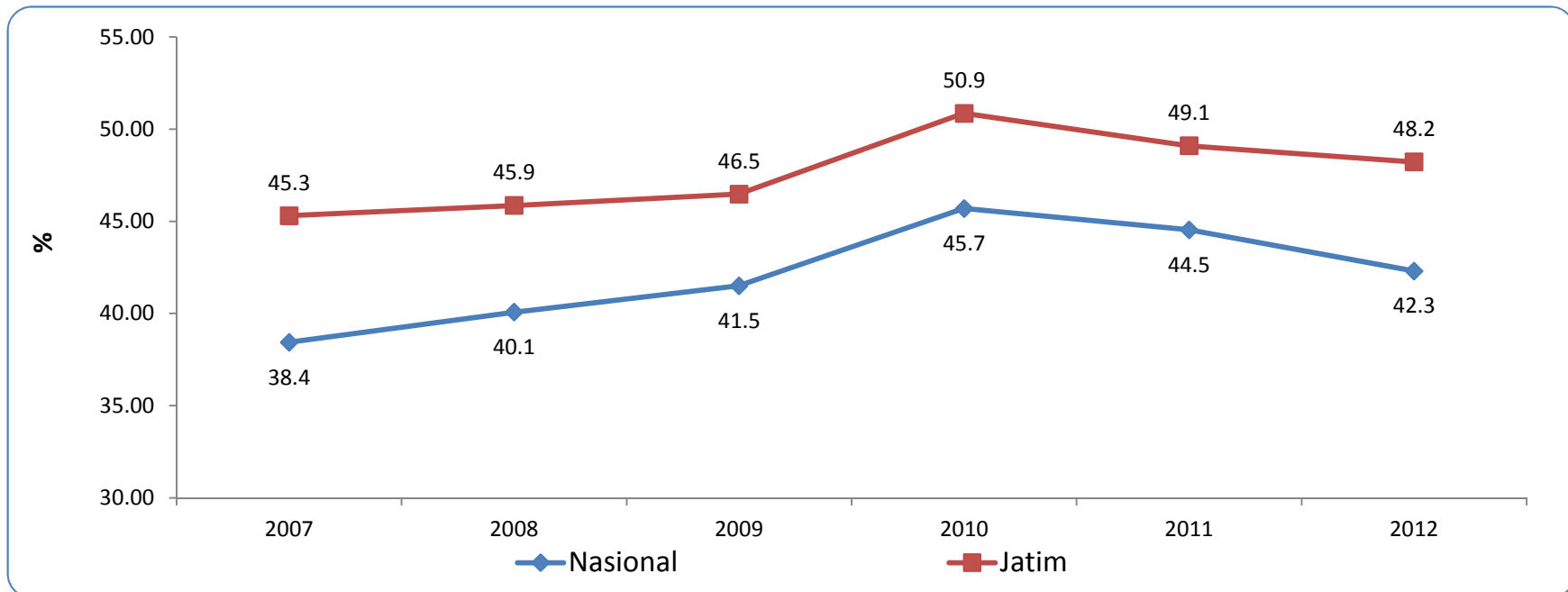


■ Belanja Pegawai ■ Belanja Modal ■ Belanja Barang ■ Belanja Lainnya

- Porsi belanja pegawai JATIM DI TA 2012 mencapai 48,2% lebih besar dibanding nasional yang hanya 42,2%.
- Porsi Belanja modal JATIM lebih rendah dari Nasional.



Perbandingan Belanja Pegawai terhadap total Belanja



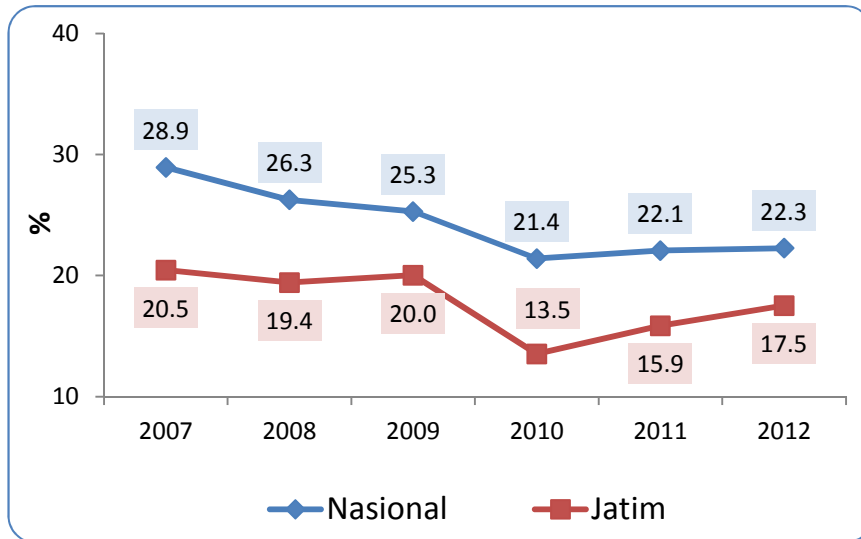
* TA 2011 dan 2012 menggunakan data anggaran

- Belanja pegawai adalah belanja yang digunakan untuk membiayai kompensasi dalam bentuk uang atau barang yang diberikan kepada pegawai pemerintah daerah, pensiunan dan pejabat daerah, kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.
- Baik secara Nasional ataupun JATIM, proporsi belanja pegawai mengalami peningkatan, namun proporsi JATIM lebih baik dimana lebih rendah dibanding Nasional.



Perbandingan Belanja Modal dan Belanja Barang & Jasa terhadap total Belanja

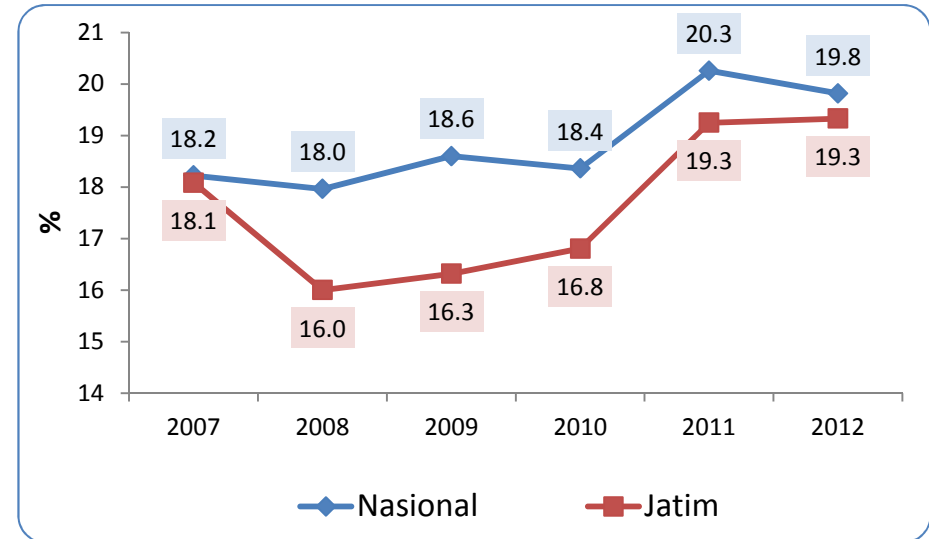
Perbandingan Belanja Modal terhadap total Belanja



* TA 2011 dan 2012 menggunakan data anggaran

- Belanja Modal adalah pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan.
- Proporsi belanja modal JATIM dan Nasional mempunyai trend turun, namun Proporsi JATIM masih lebih besar dibanding Nasional.

Perbandingan Belanja Barang & Jasa terhadap total Belanja

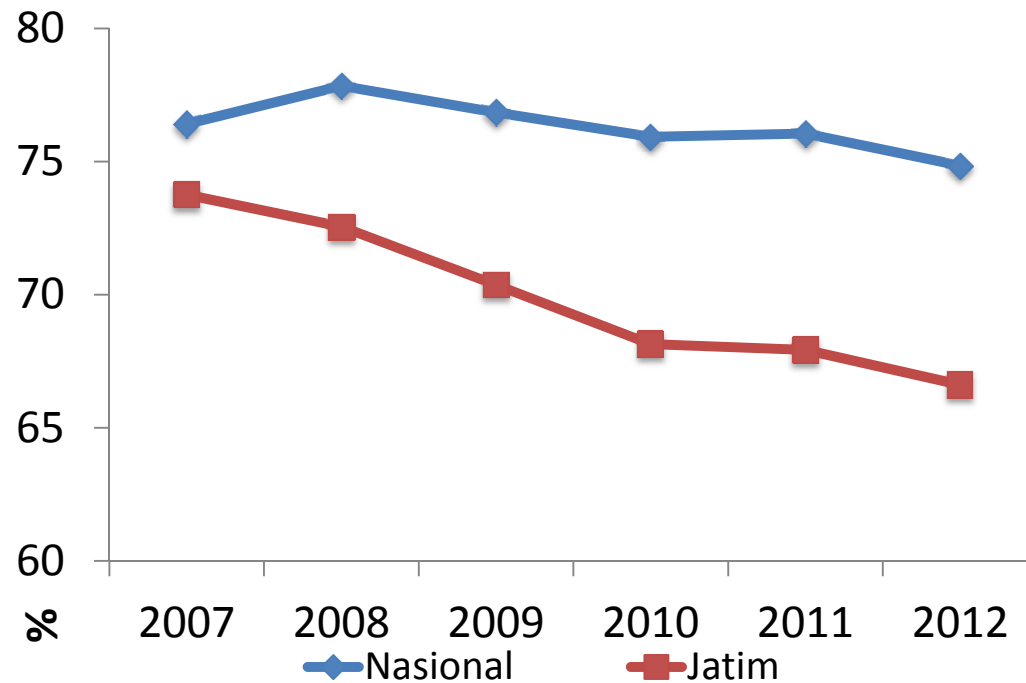


* TA 2011 dan 2012 menggunakan data anggaran

- Belanja Barang & Jasa adalah belanja untuk pembelian barang dan jasa yang habis pakai guna memproduksi barang dan jasa.
- Tahun 2008 & 2009 B. Barang&Jasa JATIM lebih tinggi dibanding dengan Nasional, namun ditahun 2010 kembali lebih kecil dari Nasional seperti tahun 2007.



Perbandingan Transfer ke Daerah terhadap Total Pendapatan



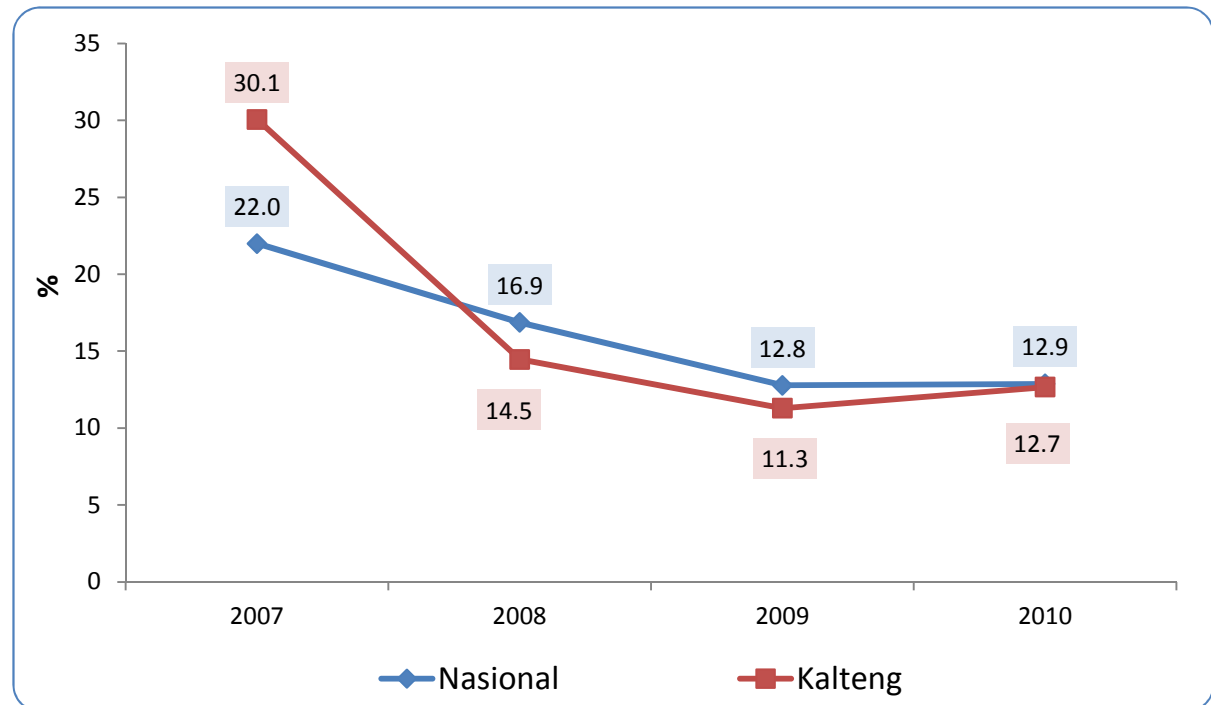
%	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Nasional	76.4	77.8	76.8	75.9	76.0	74.8
JATIM	73.75	72.56	70.37	68.15	67.9	66.6

- Transfer Ke Daerah terdiri dari transfer dana perimbangan, dana otsus dan dana penyesuaian
- Transfer daerah yang rendah menunjukkan tingkat kemandirian daerah, semakin rendah maka daerah semakin mandiri dan semakin tinggi semakin tergantung terhadap pusat.
- Berdasarkan grafik disamping terlihat bahwa tingkat kemandirian pengelolaan keuangan Jatim semakin membaik.



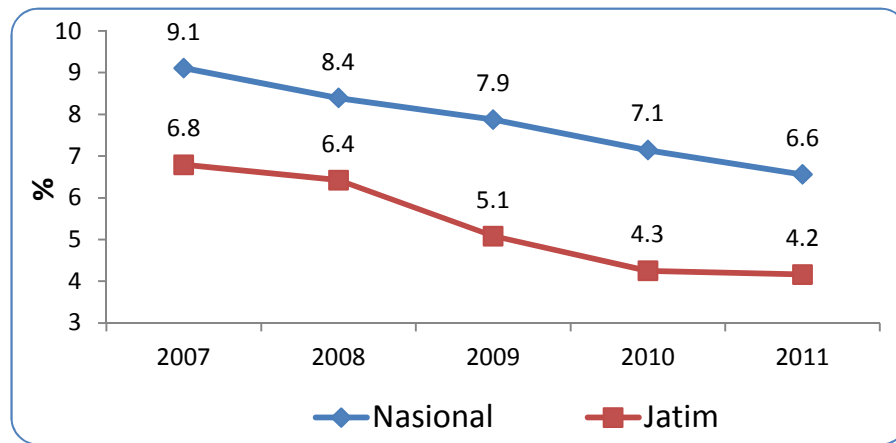
Perbandingan SiLPA tahun Berkenaan Terhadap Total Belanja

- SiLPA tahun berkenaan adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
- Rasio SiLPA yang besar menggambarkan besaran dana yang belum digunakan untuk pelayanan dasar ke masyarakat.
- SiLPA tahun berkenaan JATIM turun drastis di tahun 2008 dan mendekati proporsi secara Nasional di tahun 2010.



%	2007	2008	2009	2010
Nasional	21,99	16,87	12,78	12,87
JATIM	30,06	14,47	11,29	12,66

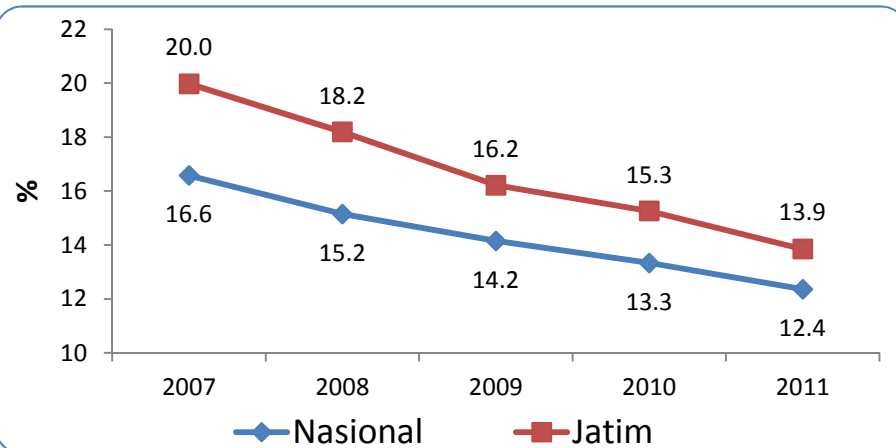
Tingkat Pengangguran



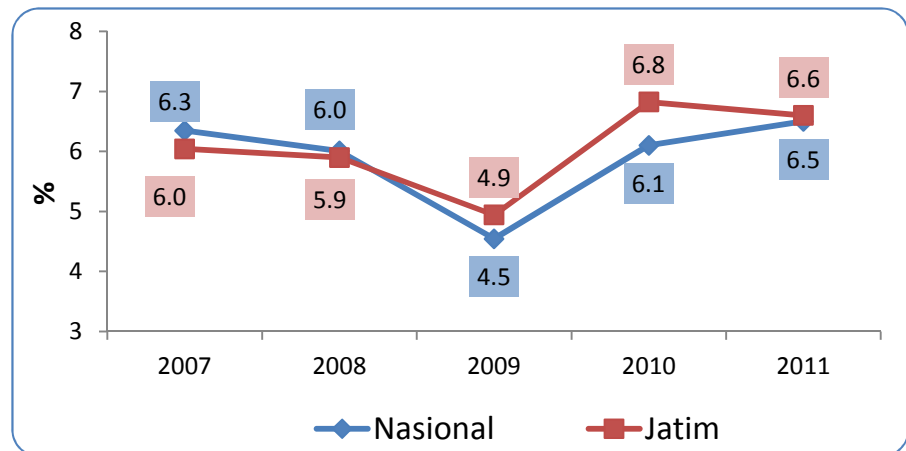
- Tingkat pengangguran JATIM lebih rendah dibanding Nasional
- Tingkat pengangguran JATIM sudah lebih rendah dibanding dengan target Pengangguran 2012 (6,4-6,6%)

Tingkat Kemiskinan

- Tingkat kemiskinan JATIM lebih tinggi jika dibanding secara nasional.
- Trend kemiskinan JATIM mempunyai trend yang sama dengan tren nasional yaitu menurun dari tahun 2007-2010.



Pertumbuhan Ekonomi



- Pertumbuhan Ekonomi JATIM mulai tahun 2009 lebih tinggi dari Nasional

Terima Kasih



**DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN
KEUANGAN
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**

**GEDUNG RADIUS PRAWIRO
JALAN DR WAHIDIN NO. 1
JAKARTA PUSAT 10710
TELP. 021 3509442
FAX. 021 3509443
www.djpk.depkeu.go.id**